

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA SEMARANG

¹ **Reina Hapsari Ayuningtyas, Amni Zarkasyi Rahman** ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: reinahapsari17@gmail.com

ABSTRAK

Regulasi tentang program kampung tematik sejatinya dibentuk untuk menangani kemiskinan di Kota Semarang. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan terkait komunikasi yang terjalin antar *stakeholders*. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi yang terjalin antar stakeholders dalam implementasi kebijakan program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang, adapun fenomena yang akan diteliti yaitu komunikasi yang dilakukan *stakeholders* dan implementasi program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang berupa Sosialisasi Perencanaan Kampung Tematik yang diikuti oleh perwakilan seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang, *workshop* dan *FGD*, sedangkan PT PLN melakukan komunikasi dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang bantuan CSR Bina Lingkungan yang akan dilaksanakan di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh akademisi Polines adalah dengan menawarkan bantuan kepada pihak Ketua RW 002 dengan cara *door to door* dan rapat koordinasi yang di hadiri oleh beberapa warga dan tokoh masyarakat setempat. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya: ketidakjelasan komunikasi yang dilakukan oleh salah satu *stakeholders* dalam mengkomunikasikan bantuan yg akan diberikan kepada warga kampung batik yang menimbulkan *mis-interpretasi*, kemudian terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan akademisi. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: perlu adanya peningkatan kesadaran antar stakeholders dalam melakukan kerjasama diperlukan komunikasi yang intensif antar stakeholders agar meminimalisir perbedaan pemahaman dalam komunikasi yang dilakukan oleh para stakeholders.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan Publik, Implementasi, Kampung Tematik

**COMMUNICATION OF PUBLIC POLICY IN IMPLEMENTING KAMPUNG TEMATIK
PROGRAM IN REJOMULYO SUB-DISTRICT OF SEMARANG**

¹ Reina Hapsari Ayuningtyas, Amni Zarkasyi Rahman ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: reinahapsari17@gmail.com

ABSTRACT

Regulation of Thematic Village program was formed to deal with poverty in the city of Semarang, but there are some problems related to communication interwoven among stakeholders in this implementation. This research aims to analyze the communication between stakeholders in implementing the policy of thematic village program in the Rejomulyo Semarang, This research will focused on Stakeholders Communication and implementation of the thematic village program in Rejomulyo Semarang. The method of research used is a qualitative descriptive approach with purposive sampling informant determination technique. The results of the study showed, communication conducted by the Government of Semarang in the form of socialization of thematic village planning followed by representatives of all kelurahan and sub-districts in Semarang, workshops and FGD, while PT PLN did direct communication by discussion on the CSR that will be implemented in Kampung Batik Rejomulyo village. Then the Polines academics is to offer assistance to the Chairman RW 002 by means of door to door and coordination meeting attended by some residents and local community figures. But in the implementation there are some obstacles include: the uncertainty of communication done by one of stakeholders in communicating the assistance that will be given to residents of Batik village that raises mis-interpretation, Then there was inconnection between the government and academics. Advice that can be given by researchers is: it is necessary to increase awareness between stakeholders in the cooperation of intensive communication between stakeholders in order to minimize understanding of the communication Performed by the stakeholders.

Keywords: *Communication of Public Policy, Implementation, Thematic Villages*

A. PENDAHULUAN

Kota Semarang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tahun 2016 masih terdapat sekitar 415 Hektar (Ha) luas daerah yang meliputi 64 kelurahan dari 15 kecamatan yang menyandang status daerah kumuh kota terutama pada daerah perlintasan kereta api, sempadan sungai, dan daerah pesisir. Permukiman kumuh yang terbentuk ini menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti: kejahatan dan sumber penyakit sosial lainnya (Suparto, 2014). Salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan permasalahan kemiskinan adalah melalui program “Gerbang Hebat”. “Gerbang Hebat” adalah singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam empat klaster, yaitu pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi UMKM dan Mikro, dan perluasan program pro rakyat. Salah satu program unggulan di dalam “Gerbang Hebat” adalah Kampung Tematik.

Kampung Tematik adalah inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan permasalahan kemiskinan dan permukiman kumuh. Sehingga pada akhir tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang membuat regulasi yang mengatur tentang program kampung tematik dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) tentang Petunjuk Pembentukan Kampung Tematik. Kemudian barulah pada tahun 2018 disahkan dalam bentuk peraturan

walikota yakni Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Maksud dari dicanangkannya Program Kampung Tematik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu Kampung Tematik yang potensial adalah Kampung Batik yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Kampung Batik adalah salah satu kampung tematik yang memiliki kriteria kelayakan tema ekonomi karena memiliki potensi lokal yang bisa dikembangkan. Potensi lokal yang dimiliki adalah kerajinan batik khas Semarangan. Sesuai yang termaktub di dalam Peraturan Wali Kota Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik bahwa pelaksanaan Kampung Tematik melibatkan seluruh stakeholders yang ada termasuk di dalamnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Akademisi. Sesuai dengan regulasinya, implementasi program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo sendiri terdapat stakeholders yang terlibat di dalamnya, antara lain Pemerintah Kota Semarang beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, PT. PLN (Persero) Distribusi DIY Jateng yang bekerja sama Polines sebagai pihak ketiga. Salah satu unsur dalam Pemerintah Kota Semarang yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang melakukan perencanaan dan mengawal pelaksanaan dari program kampung tematik. Sedangkan CSR yang dilakukan PT. PLN (Persero) distribusi Jateng dan DIY yang bekerjasama dengan pihak akademisi dari Polines ialah program Bina Lingkungan. Keluaran (output) dari

Kampung Tematik dijelaskan pada Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik yaitu terbentuknya kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman, terbentuknya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan karakteristik dan potensi wilayah, serta memecahkan permasalahan yang ada secara bersama-sama, dan terbentuknya semangat masyarakat dalam membangun diri dan wilayah.

Implementasi program kampung tematik di Kampung Batik menurut Bappeda Kota Semarang sudah memberikan hasil atau output dengan melihat bagaimana program tersebut memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Fakta di lapangan ditemukan adanya miss-interpretasi di dalam transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY kepada akademisi Polines dan Masyarakat. Dimana pada proses komunikasi yang dilakukan oleh ketiga unsur tersebut terjadi perbedaan pemahaman mengenai apa yang ditransmisikan. Selain itu PT. PLN mengatakan bahwa program Bina Lingkungan yang dijalankan adalah sustainable program dan masih dilakukan interaksi dengan masyarakatnya hingga saat ini. Namun warga penerima bantuan mengatakan bahwa program hanya berlangsung pada tahun 2017 dan tidak ada kunjungan lagi oleh pihak pemberi bantuan. Implementasi kebijakan tidak terlepas dari proses komunikasi. Sebelum dilaksanakannya sebuah kebijakan maka perlu adanya penyampaian informasi kebijakan publik terlebih dahulu, agar para pelaku kebijakan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan

publik tersebut. Untuk itu, komunikasi yang tidak berjalan baik akan menjadi suatu permasalahan, salah satu akibatnya adalah warga yang menjadi sasaran dari kebijakan tidak memahami dengan baik maksud dan tujuan dari diadakannya program kampung tematik. DE Nurati, 2016 dalam jurnalnya mengatakan penyampaian informasi kebijakan publik perlu dilandasi dengan beberapa macam dimensi, yaitu dimensi transformasi (transmisi) komunikasi, dimensi kejelasan komunikasi, dan dimensi konsistensi komunikasi. Terdapat dua fenomena yang ditemui yaitu permasalahan komunikasi dan pencapaian tujuan program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai komunikasi yang dilakukan oleh stakeholders dalam program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Melalui penelitian ini agar dapat diketahui bagaimana kebijakan program kampung tematik yang akan diimplementasikan terlebih dahulu dikomunikasikan, sehingga tergambar proses komunikasi yang dilakukan stakeholders.

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Secara etimologis, policy berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi politia yang berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (the middle English), kata tersebut menjadi policie yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003: 7). Sedangkan menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the

autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012:674) Hal itu juga sejalan dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kemudian, teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi,
- b) Sumberdaya,
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi,

c. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, George C. Edward sebagaimana dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi didalam implementasi kebijakan, yaitu: Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

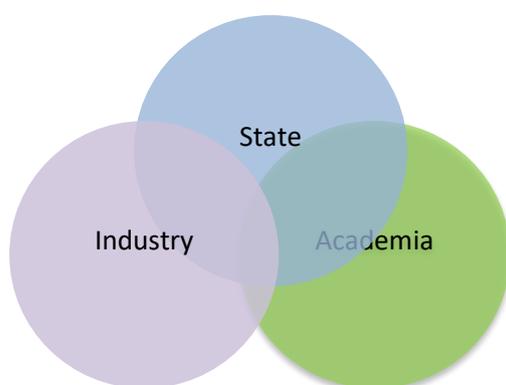
1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.

2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

d. Triple Helix

Triple Helix merupakan interaksi antara pemerintah, bisnis dan universitas yang dikembangkan oleh Etzkowitz & Leydesdorff pada tahun 1990. Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka normatif untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu juga menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama dari tesis Triple Helix adalah bahwa antara akademisi, industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi.



Gambar 1. Konsep *Triple Helix* (sumber: Etzkowitz dan Leydesdorff 2000 dalam MF Izzati 2018).

Hubungan yang muncul dalam Triple Helix, umumnya bermula dari upaya pemecahan masalah dan menghasilkan strategi ketika menghadapi masalah dalam inovasi, bukan ditentukan dari suatu pola tertentu. Melalui proses interaksi ini maka akan terjadi perubahan aktor dan peran yang mereka lakukan (Leydesdorff dalam Muhammad Fakhrol, 2018). Dengan demikian, pola triple-helix inovasi adalah dinamis seiring perubahan waktu.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan atau penggunaan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia (John W. Creswell, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha mengungkap suatu masalah/keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian ditekankan kepada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti (Hadar Nawawi, 2003:31). Lokasi penelitian yang diambil adalah Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur, Jawa Tengah sebagai lokasi dimana Kampung Tematik bertemakan Kampung Batik berdiri. Subyek penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian merupakan subyek yang dapat memberikan data mengenai masalah yang diteliti. Teknik pemilihan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Berdasarkan

pertimbangan di atas maka informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Kepala Bidang CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Akademisi Polines, Lurah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Jawa Tengah, Ketua RW 002 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Jawa Tengah dan Warga Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks tulisan dan kata-kata tertulis (Moloeng, 2007: 159). Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2014: 224–225). Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis kualitatif, Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data*

D. PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan Publik dalam Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang

Pada penelitian ini terdapat tiga aktor yang berkolaborasi dalam pelaksanaan implementasi program kampung tematik di

Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang yang meliputi Pemerintah Kota Semarang, PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY, Akademisi Politeknik Negeri Semarang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang

Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang adalah dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk: Sosialisasi Perencanaan Kampung Tematik yang diikuti oleh perwakilan seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang, *workshop* dan *FGD* bertema Pengentasan Kemiskinan Kota Semarang melalui Program Kampung Tematik, sosialisasi yang dilakukan ketua RW dan Tokoh masyarakat pada saat kumpul warga, musyawarah yang dilakukan oleh Kelurahan dan perwakilan masyarakat serta melalui website semarang.go.id. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang sudah jelas dibuktikan dengan pengakuan pelaksana kebijakan dan keadaan dilapangan yaitu terlaksananya tujuan program kampung tematik yang ditransmisikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada seluruh *stakeholders* dan masyarakat. Namun sayangnya, *Workshop* dan *FGD* yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang tidak dihadiri oleh pihak akademisi Polines yang juga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program kampung tematik di Kampung Batik. Berdasarkan wawancara dengan akademisi Polines juga, pihak privat dalam hal ini PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY melakukan komunikasi dengan Polines dengan hanya mendiskusikan mengenai program binaan lingkungan yang akan dilakukan di Kampung Batik tanpa mentransmisikan informasi mengenai

program kampung tematik terlebih dahulu kepada akademisi Polines. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa seharusnya terdapat kesinambungan antara komunikasi Pemerintah Kota Semarang, PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY, dan akademisi Polines sesuai dengan konsep *triple helix* yang dikatakan oleh pihak PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY. Namun pada kenyataannya transmisi komunikasi mengenai program kampung tematik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak ada hubungan atau komunikasi dengan akademisi Polines yang melakukan program Bina Lingkungan di Kampung Batik

2. Komunikasi yang dilakukan PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY

Komunikasi yang dilakukan sektor privat ini adalah bentuk tindak lanjut dari transmisi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang kepada PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang bantuan CSR Bina Lingkungan yang akan dilaksanakan di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah terdapat ketidakjelasan komunikasi pada transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY yaitu PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY mengaku memberikan bantuan pelatihan membatik dan bantuan sumber daya dana yang diberikan kepada kepala paguyuban pengrajin batik. Namun pernyataan lain diberikan oleh warga penerima bantuan yang mengaku bahwa bantuan hanya berupa barang dan alat untuk membatik serta pelatihan membatik. Dari kedua argumen yang berbeda tersebut ditemukan adanya ketidakjelasan komunikasi di dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT.

PLN Distribusi Jateng dan DIY dimana terdapat ambiguitas pada proses komunikasi dan pelaksanaannya karena terdapat perbedaan pemahaman antara pihak PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY dan akademisi Polines. Perbedaan pemahaman oleh PT. PLN dan akademisi Polines di lapangan mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang di komunikasikan sebelumnya. Hal ini disebabkan komunikasi yang dilakukan PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY tidak dilakukan intensif, hanya dilakukan pada perencanaan program Bina Lingkungan saja

3. Komunikasi yang dilakukan Akademisi Polines

Komunikasi yang dilakukan oleh akademisi Polines adalah dengan menawarkan bantuan kepada pihak Ketua RW 002 dengan cara *door to door* dan rapat koordinasi yang di hadiri oleh beberapa warga dan tokoh masyarakat setempat. Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh akademisi sudah jelas sesuai dengan komunikasi yang dilakukan Polines kepada warga dan hasil yang diterima oleh warga Kampung Batik. Hasil dari komunikasi yang dilakukan akademisi adalah pemberian bantuan yang berupa barang dan alat membatik, selain barang dan alat membatik CSR Bina Lingkungan yang diadakan PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY dan Polines memberikan *workshop* dan pelatihan pengembangan batik. Namun menurut warga intensitas komunikasi tidak berlanjut hingga sekarang. Terdapat permasalahan lain dimana pihak akademisi tidak saling berkomunikasi dengan sektor pemerintahan dimana menurut penjelasan dari PT. PLN bahwa program yang dilaksanakan ini menggunakan konsep *triple helix*. Faktanya, terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan akademisi.

Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang (Hubungan Komunikasi dengan Pencapaian Tujuan Program)

Pada penelitian ini peneliti akan melihat keberhasilan implementasi berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan dari kebijakan program kampung tematik. Terimplementasinya tujuan-tujuan kebijakan program kampung tematik tidak luput dari peran komunikasi yang dilakukan para stakeholders karena sebelum dilaksanakannya sebuah kebijakan maka pasti ada transmisi komunikasi yang dilakukan untuk menghampakan substansi dari program kepada *stakeholders* dan kelompok sasaran. Adapun tercapainya tujuan program di Kampung Batik sebagai berikut:

1. Mengubah Lingkungan Kumuh Menjadi tidak Kumuh (Melalui Perbaikan Kondisi Lingkungan).

Setelah adanya program Kampung Tematik, warga Kampung Batik menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya. Perbaikan kondisi lingkungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kondisi Kampung Batik setelah Program Kampung Tematik
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Gambar di atas menunjukkan kebersihan lingkungan dan keindahan wilayah

Kampung yang dihiasi oleh mural-mural, gapura pintu masuk yang berukir batik, juga terdapat pelabelan dengan tulisan “Kampung Batik” yang juga dapat dijadikan spot berfoto para wisatawan.

2. Pelibatan Partisipasi / Peran Serta Masyarakat secara Aktif di dalam Program Penanggulangan Kemiskinan.

Keberhasilan transmisi komunikasi selanjutnya dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam implementasi program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, partisipasi masyarakat di Kampung Batik dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga masyarakat mengerti permasalahan wilayahnya sendiri, mengkaji, dan membuat keputusan serta memecahkan masalahnya.

Pada tahap perencanaan program kampung tematik, warga Kampung Batik melakukan musyawarah untuk merencanakan program yang akan dilakukan serta menyusun bantuan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan tersebut. Hasil musyawarah ini kemudian disusun menjadi proposal oleh perwakilan masyarakat untuk kemudian diseleksi oleh Bappeda Kota Semarang. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu dirapatkan melalui pertemuan rutin yang ada. Pertemuan rutin tersebut dapat berupa rapat RW, rapat RT, pertemuan paguyuban maupun pertemuan lain yang ada di Kampung Batik. Masyarakat pun sering melakukan koordinasi secara informal dengan mengobrol santai di warung maupun gazebo

yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya. Masyarakat Kampung Batik merasa bahwa inspirasi akan lebih sering datang saat mengobrol santai dengan masyarakat lainnya.

3. Mengangkat Potensi Lokal dan Sosial Masyarakat Setempat

Sesuai namanya, Kampung Batik berfokus pada pengangkatan potensi lokal yang dimiliki kelurahan Rejomulyo ini yaitu kerajinan batik khas Semarang. Corak batik Semarang yang sudah ada sejak dulu ini dikembangkan menjadi salah satu daya tarik kampung tematik ini. Pengangkatan potensi lokal melalui batik diawali dengan bantuan dana dari Pemerintah Kota Semarang senilai 200 juta pada awal pelaksanaan program kampung tematik. Setelahnya, pemerintah pun banyak melakukan promosi di setiap *event* Pemerintah Kota ataupun melalui *social media*. Hal inilah yang membuat eksistensi Kampung Batik semakin meningkat. Dalam perkembangannya pun, kini semakin marak usaha batik yang tersebar setelah adanya kampung tematik ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun melakukan berbagai upaya dalam peningkatan eksistensi kampungnya, baik dari penjualan batik dengan *showroom* yang ada di Kampung Batik maupun paket wisata batik yang disediakan di Kampung Batik. Paket-paket tersebut pun juga merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung sambil mengenalkan batik-batik Semarang maupun motif batik lain. Paket wisata yang disediakan pun beragam, mulai dari memperlihatkan cara masyarakat membatik sampai dengan praktek pembuatan batik yang bisa diikuti. Selain menjual kain-kain batik, masyarakat juga berinovasi dengan membatik menggunakan media yang beragam. Tidak hanya kain, namun juga kayu atau media-media lain yang bisa digunakan. Dalam perkembangannya, batik dapat dikatakan sebagai penggerak ekonomi lokal serta sarana

peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada, peningkatan kualitas sumber daya manusia didalamnya serta menjadi upaya peningkatan perekonomian lokal.

4. Peningkatan Keperdulian Masyarakat dan Membentuk Identitas Kampung sebagai Spirit Pembangunan, serta Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam proses pengembangan kampung tematik di Kampung Batik ini tercipta keperdulian masyarakat di dalamnya. Diawali dengan pembangunan salah satu RT di Kampung Batik tersebut oleh pemerintah, beberapa RT lain pun tergerak untuk memperindah RT nya sendiri, salah satunya adalah Kampung Jadhoel yang berada di RT 4.



Gambar 2. Kampung Jadhoel
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kampung Jadoel termotivasi untuk memperindah wilayahnya sendiri dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan swadaya warga. Kampung Jadoel bahkan memiliki kas untuk pengembangan kampungnya sendiri. Dengan kas tersebut, masyarakat didalamnya bergotong royong membangun identitas kampungnya sendiri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memperindah jalan RT nya dengan lukisan-lukisan penuh makna. Tidak hanya dengan

kas yang ada, masyarakatnya pun terbantu oleh pihak ketiga yang memberikan bantuan. Salah satunya adalah CSR Bina Lingkungan yang memberikan bantuan karena melihat potensi serta keunikan yang ada di dalam Kampung Jadhoel tersebut.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis mengenai komunikasi dalam implementasi program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang adalah komunikasi yang dilakukan stakeholders adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang: Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang adalah dengan cara komunikasi secara langsung, dalam bentuk: Sosialisasi, *workshop* dan *FGD*. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang sudah jelas dibuktikan dengan pengakuan pelaksana kebijakan dan keadaan dilapangan yaitu terlaksananya tujuan program kampung tematik yang ditransmisikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada seluruh *stakeholders* dan masyarakat. Namun kegiatan tidak dihadiri oleh *stakeholder* dari kelompok akademisi.
2. Komunikasi yang dilakukan PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY: Komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi. Namun, terdapat ketidakjelasan

komunikasi pada transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY warga penerima bantuan sehingga menimbulkan mis-interpretasi.

3. Komunikasi yang dilakukan Akademisi Polines: Komunikasi yang dilakukan oleh akademisi Polines adalah dengan menawarkan bantuan kepada pihak Ketua RW 002 dengan cara *door to door* dan rapat koordinasi dengan warga setempat. Komunikasi yang dilakukan sudah jelas. Namun intensitas komunikasi tidak berlanjut hingga sekarang. Pihak akademisi tidak saling berkomunikasi dengan sektor pemerintahan dimana menurut penjelasan dari PT. PLN bahwa program yang dilaksanakan ini menggunakan konsep *triple helix*. Faktanya, terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan akademisi.

Kemudian, pada penelitian ini peneliti akan melihat keberhasilan implementasi berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan dari kebijakan program kampung tematik. Terimplementasinya tujuan-tujuan kebijakan program kampung tematik tidak luput dari peran komunikasi yang dilakukan para stakeholders karena sebelum dilaksanakannya sebuah kebijakan maka pasti ada transmisi komunikasi yang dilakukan untuk menghimpakan substansi dari program kepada *stakeholders* dan kelompok sasaran. Adapun tercapainya tujuan program di Kampung Batik sebagai berikut:

1. Mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh (melalui perbaikan kondisi lingkungan): Setelah adanya program

kampung tematik wilayah Kampung Batik menjadi lebih bersih dan indah. Hampir seluruh tembok kampung dihiasi oleh mural-mural, gapura pintu masuk yang berukir batik, juga terdapat pelabelan dengan tulisan “Kampung Batik” yang juga dapat dijadikan spot berfoto para wisatawan.

2. Pelibatan partisipasi / peran serta masyarakat secara aktif di dalam program penanggulangan kemiskinan: Partisipasi masyarakat di Kampung Batik dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat mengerti permasalahan wilayahnya sendiri, mengkaji, dan membuat keputusan serta memecahkan masalahnya.
3. Mengangkat potensi lokal dan sosial masyarakat setempat: Program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo memberikan dampak semakin maraknya usaha batik yang tersebar. Selain maraknya penjual batik yang ada di Kampung Batik ada juga paket wisata batik yang disediakan di Kampung Batik. Paket-paket tersebut pun juga merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung sambil mengenalkan batik-batik Semarangan maupun motif batik lain.
4. Peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai spirit pembangunan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat: Terciptanya “Kampung Jadoel” adalah bentuk kepedulian masyarakat RT 4 Kampung Batik yang termotivasi untuk membentuk identitas di wilayah RT nya, salah satu upaya dalam pembangunannya dilakukan dengan swadaya warga.

b. Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis mengenai Komunikasi dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang maka penulis memberi rekomendasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi:

1. Untuk mengatasi permasalahan kesinambungan komunikasi antar pemerintah, privat dan akademisi maka perlu adanya peningkatan kesadaran antar *stakeholders* dalam melakukan kerjasama dengan cara memperjelas tupoksi masing-masing dalam pengembangan kampung tematik di dalam SOP Petunjuk Pembentukan Kampung Tematik.
2. Untuk meningkatkan keefektifan komunikasi antar *stakeholders*, maka diperlukan komunikasi yang intensif antar *stakeholders* agar ada pertukaran gagasan, dan pertukaran informasi yang didapatkan oleh masing-masing *stakeholders* sehingga meminimalisir perbedaan pemahaman dalam komunikasi yang dilakukan oleh para *stakeholders*. Contohnya, PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY dapat menjadwalkan rapat yang rutin setiap bulan yang dihadiri oleh akademisi Polines dan warga penerima bantuan agar dapat dievaluasi apakah intruksi yang diberikan PT. PLN pada saat melakukan transmisi dengan akademisi Polines betul dipahami oleh akademisi Polines dan dapat diketahui bantuan yang diberikan kepada warga sudah sesuai dengan intruksi yang diberikan PT. PLN kepada akademisi Polines dengan cara menampung aspirasi dan pendapat dari warga penerima bantuan. Selain itu komunikasi juga harus dilakukan rutin hingga sekarang untuk

mengetahui bagaimana kondisi dan perkembangan dari wilayah binaannya.

F. REFERENSI

Buku-buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Agustinus, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aprillia Theresia, dkk. 2014. *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi, Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Inu Kencana Syafiie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Keban, Jeremias T. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Strategis Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Kompas Media.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Premada Media Group
- Wahab, Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Jurnal:

- Rahman, Zarkasyi, Amni dan Novitasari, Diah. 2018. *Triple Helix in the Poverty Reduction Policy Based on Community Empowerment in Semarang City*. Universitas Diponegoro.
- Goswami, S dan Manna, S. 2010. *Urban Poor Living in Slums: A Case Study of Raipur City in India*. Global

- Journal of HUMAN SOCIAL SCIENCE Sociology & Culture.
- Izzati, Fahrul, M. *Implementasi Triple Helix dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif di Kota Malang sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Universitas Brawijaya.
- Khan, Rahman, Anisur. 2016. *Policy Implementation: Some Aspects and Issues*. *Journal of Community Positive Practices*. *Journal of Community Positive Practices*.
- Knobloch, K.R., Gastil, J., Reedy, J., & Walsh, K.C. 2013. *Did They Deliberate? Applying an Evaluative Model of Democratic Deliberation to the Oregon Citizens Initiative Review*. *Journal of Applied Communication Research*.
- Marume, SBM, dkk. 2016. *An Analysis of Public Policy Implementation*. *IOSR Journal of Business and Management*.
- Mthethwa, R.M. 2012. *Critical Dimensions for Policy Implementation*. *African Journal of Public Affairs*.
- Astriani, Nadya. 2014. *Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang di Jawa Barat*. Universitas Padjajaran.
- Nurati, DE. 2016. *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)*. Universitas Selamat Riyadi Surakarta.
- Susanti, Ari, Eka, dkk. 2013. *Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Ramadhani, Thoriq. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. STIA LAN Jakarta.
- Razak, Abdul, Norizan, dkk. 2013. *A Development of Smart Village Implementation Plan for Agriculture: A Pioneer Project in Malaysia*. *Proceedings of the 4 th International Conference on Computing and Informatics*.
- Setiadi, Rukuh and Ma'rif, Samsul. 2009. *Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Jurnal RIPTEK Universitas Diponegoro*.
- Syani, Khairul, Ahmad, dkk. 2017. *Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Syarif, Ahmad, dkk. 2014. *The Importance Of Communication And Information In The Implementation of Disaster Management Policy In Makassar City*. Universitas Hasanudin.
- Sidauruk, Erick. 2010. *Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang*

Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya. Universitas Lampung.

Evtasari, WR. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*. Universitas Negeri Surabaya.

Siregar, Juliani, Tety. 2010. *Keperdulian Masyarakat dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Kumuh di Kelurahan Matahalasan Kota Tanjungbalai*. Universitas Diponegoro.

Tahir, Arifin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/05/kota-semarang-dan-cilacap-memimpin-perekonomian-jawa-tengah/>
[http://jateng.tribunnews.com/2017/11/21/dat](http://jateng.tribunnews.com/2017/11/21/dat-a-lengkap-umk-2018-di-jawa-)
[a-lengkap-umk-2018-di-jawa-](http://jateng.tribunnews.com/2017/11/21/dat-a-lengkap-umk-2018-di-jawa-)

Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.

Sumber lain:

RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021

RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025

Standard Operational Procedur (SOP) Petunjuk Pembentukan Kampung Tematik (Kota Semarang)

Peraturan Walikota Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik

<https://semarangkota.bps.go.id/>

[tengah-yang-baru-saja-diumumkan-gubernur-ganjar](https://semarangkota.bps.go.id/)

<http://bpbd.semarangkota.go.id/pages/sekilas-bpbd-kota-semarang>